

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berperan penting bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia karena kontribusinya sebesar 59,8% terhadap total Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia (BPS, 2012 dan Hayashi, 2002). Badan Pusat Statistik tahun 2012 mencatat bahwa jumlah UKM mencapai 56,54 juta unit yang setara dengan 99,99% dari total unit bisnis di Indonesia dan juga berarti menyerap tenaga kerja yang banyak. Usaha mikro kecil dan menengah mampu menyediakan lapangan kerja bagi 107 juta pekerja atau menyerap sekitar 97% tenaga kerja (BPS, 2012).

Masalah yang dihadapi oleh UMKM di Indonesia pada dasarnya dapat dikategorikan menjadi masalah internal dan masalah eksternal (Setyari, 2005 dan Hafsah, 2004). Masalah yang terkait dengan faktor internal adalah: (1) terbatasnya permodalan, (2) sumber daya manusia yang terbatas, dan (3) lemahnya jaringan usaha dan kemampuan penetrasi pasar. Selanjutnya masalah yang terkait dengan faktor eksternal adalah: (1) iklim usaha belum sepenuhnya kondusif, (2) terbatasnya sarana dan prasarana usaha, (3) impikasi otonomi

daerah, (4) sifat produk dengan *life time* pendek, (5) terbatasnya akses pasar, dan (6) implikasi perdagangan bebas.

Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM, yang diikuti dengan adanya Nota Kesepahaman Bersama antara Departemen Teknis, Perbankan, dan Perusahaan Penjaminan yang ditandatangani pada tanggal 9 Oktober 2007 dengan ditandai peluncuran Penjaminan Kredit atau Pembiayaan kepada UMKM. Presiden R.I Susilo Bambang Yudhoyono Tanggal 5 November 2007, meresmikan kredit bagi UMKM dengan pola penjaminan tersebut dengan nama Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kredit Usaha Rakyat, yang selanjutnya disingkat KUR, adalah kredit atau pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah Koperasi (UMKM-K) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif. 4 Tujuan diluncurkannya KUR menurut Retnadi (2008) adalah (i) untuk mempercepat pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM; (ii) untuk meningkatkan akses pembiayaan kepada UMKM dan Koperasi; (iii) untuk penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja. Menurut Retnadi (2008), meskipun sebelum tahun 2007, cukup banyak program pemerintah yang ditujukan untuk mempercepat perkembangan UMKM melalui berbagai jenis kredit perbankan, namun perkembangan berbagai program tersebut tampaknya belum menarik minat perbankan sehingga dampaknya belum dirasakan secara signifikan oleh para pelaku UMKM di tingkat akar rumput (*grass root*). Sebelum adanya program

KUR, pemerintah telah mengeluarkan beberapa program pekreditan bagi UMKM, seperti KKP-E (kredit ketahanan pangan dan energi), KKPA (Kredit kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya) , dan KUMK (kredit usaha mikro kecil). Namun, terdapat perbedaan yang mendasar diantara KUR dengan kredit tersebut, yaitu dalam hal agunan, KUR merupakan kredit tanpa agunan namun dijamin oleh pemerintah, sedangkan kredit tersebut merupakan kredit yang memerlukan agunan untuk mengakses.

Pemerintah diawal meluncurkan bank yang terlibat antara lain: Bank BNI, Bank BTN, Bank Bukopin, Bank Syariah Mandiri. Penyaluran KUR dapat lebih ditingkatkan agar lebih cepat dan dapat disalurkan secara lebih merata ke daerah-daerah, maka berdasarkan keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor KEP-07//M.EKON/01/2010 tanggal 26 Januari 2010 dilakukan penambahan bank pelaksana sebanyak 13 (tiga belas) Bank pembangunan Daerah dan salah satunya adalah PT. Bank Nagari

PT. Bank Nagari sebagai bank pelaksana KUR diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan sektor riil dan program-program pengentasan kemiskinan, pengurangan tingkat pengangguran dan perluasan lapangan pekerjaan serta peningkatan taraf hidup masyarakat. Perhatian lebih tersebut antara lain akan diwujudkan dalam bentuk keringanan persyaratan agunan, dokumen persyaratan kredit, proses yang lebih cepat, pemberian tarif yang ringan dan lainnya.

Penyaluran KUR di PT. Bank Nagari dapat berjalan optimal, maka beberapa kebijakan pendukung disamping peraturan pelaksanaan ini telah dipersiapkan dan ditetapkan, menurut keputusan Direksi Nomor SK/139/DIR/10-2010 diantaranya :

- Penunjukan petugas khusus yang fokus untuk penyaluran, pemungutan setoran, pembinaan nasabah, penagihan dan pengelolaan KUR. Petugas khusus akan ditempatkan dikantor-kantor yang potensial untuk penyaluran KUR, pemberian reward/punishment dan mereka dilengkapi dengan sarana pendukung seperti seragam, sepeda motorn dan lainnya.
- Pemberian pendidikan kepada petugas khusus dan penjabat/staf Kantor Cabang dan Cabang Pembantutentang program KUR.
- Melakukan program promosi KUR seperti dalam bentuk spanduk, baliho, stiker, media iklan, bantuan kepada usaha mikro dalam bentuk tempat perdagangan, tenda dagang, merk took dan lainnya.

Penerapan peraturan pelaksanaan ini dengan beberapa kebijakan pendukungnya, maka diharapkan penyaluran KUR oleh PT. Bank Nagari dapat dengan baik serta dilaksanakan sepenuhnya sehingga rencana penyaluran KUR tersebut dapat direlalisir sebagaimana yang diharapkan. Berdasarkan apa yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis tertarik menulis dengan judul :**”Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada PT. Bank Nagari Cabang Utama Padang”**

1.2 Perumusan Masalah

PT Bank Nagari memiliki beberapa macam produk diantaranya tabungan, deposito, giro, kredit dan jasa bank lainnya. Dari berbagai macam produk tersebut yang menjadi perhatian penulis adalah produk kredit khususnya Kredit Usaha Rakyat. Maka dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat maka terdapat beberapa masalah yang akan penulis bahas antara lainnya :

1. Menjelaskan Sumber dana Kredit Usaha Rakyat pada PT. Bank Nagari?
2. Bagaimana Prosedur Pemberian Kredit Usaha Rakyat pada Bank Nagari Cabang Utama Padang?
3. Bagaimana pengawasan dan Pembinaan Kredit pada PT. Bank Nagari Cabang Utama Padang?

1.3 Tujuan Penulisan

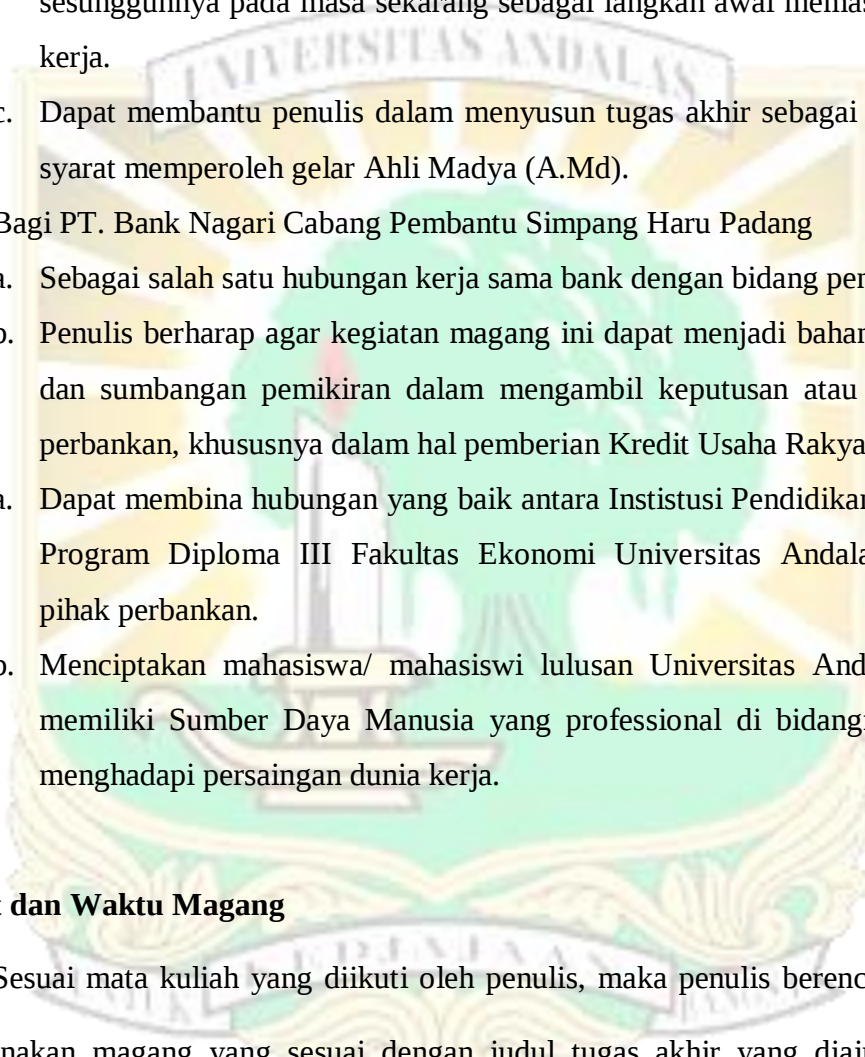
Ada beberapa tujuan penulisan ini diantaranya adalah :

1. Menjelaskan Sumber dana Kredit Usaha Rakyat pada PT. Bank Nagari
2. Mengetahui Prosedur Pemberian Kredit Usaha Rakyat pada PT. Bank Nagari
3. Mengetahui Pengawasan dan pembinaan Kredit Usaha Rakyat pada PT. Bank Nagari

1.4 Manfaat Penulisan

Adapun manfaat yang ingin diperoleh penulis dari kegiatan magang ini, adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis

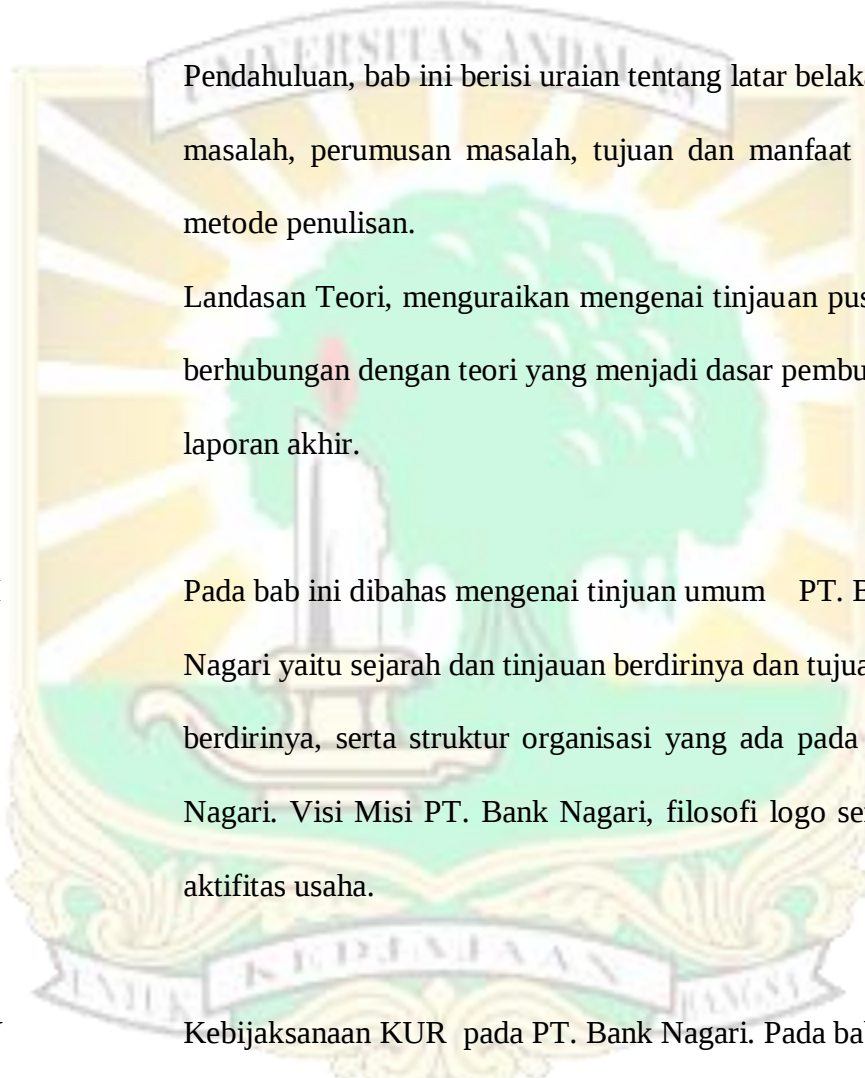
- 
- a. Menambah wawasan penulis dan memperdalam pengetahuan tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Nagari Cabang Pembantu Simpang Haru Padang.
 - b. Untuk mengetahui dan mengenal secara langsung dunia kerja yang sesungguhnya pada masa sekarang sebagai langkah awal memasuki dunia kerja.
 - c. Dapat membantu penulis dalam menyusun tugas akhir sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md).
2. Bagi PT. Bank Nagari Cabang Pembantu Simpang Haru Padang
 - a. Sebagai salah satu hubungan kerja sama bank dengan bidang pendidikan.
 - b. Penulis berharap agar kegiatan magang ini dapat menjadi bahan masukan dan sumbangan pemikiran dalam mengambil keputusan atau kebijakan perbankan, khususnya dalam hal pemberian Kredit Usaha Rakyat.
 - a. Dapat membina hubungan yang baik antara Instistusi Pendidikan terutama Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas dengan pihak perbankan.
 - b. Menciptakan mahasiswa/ mahasiswi lulusan Universitas Andalas yang memiliki Sumber Daya Manusia yang professional di bidangnya untuk menghadapi persaingan dunia kerja.

1.5 Tempat dan Waktu Magang

Sesuai mata kuliah yang diikuti oleh penulis, maka penulis berencana untuk melaksanakan magang yang sesuai dengan judul tugas akhir yang diajukan oleh penulis. Dalam pelaksanaan magang ini saya sebagai penulis memilih tempat magang yaitu pada PT. Bank Nagari cabang Pembantu Simpang Haru, dikegiatan ini dilakukan selama 40 hari kerja dari tanggal 7 januari 2019

1.6 Sistematika Penulisan

Sesuai dengan judul laporan akhir ini, maka penulis memberikan batasan pada pembahasannya sesuai dengan pokok persoalan. Dalam sistematika penulis antara lain :

- 
- BAB I Pendahuluan, bab ini berisi uraian tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, metode penulisan.
- BAB II Landasan Teori, menguraikan mengenai tinjauan pustaka yang berhubungan dengan teori yang menjadi dasar pembuatan laporan akhir.
- BAB III Pada bab ini dibahas mengenai tinjauan umum PT. Bank Nagari yaitu sejarah dan tinjauan berdirinya dan tujuan berdirinya, serta struktur organisasi yang ada pada PT. Bank Nagari. Visi Misi PT. Bank Nagari, filosofi logo serta bentuk aktifitas usaha.
- BAB IV Kebijakan KUR pada PT. Bank Nagari. Pada bab ini dibahas studi penulis selama di PT. Bank Nagari yang menguraikan tentang kredit yang disalurkan oleh PT. Bank Nagari, kebijakan penyaluran kredit usaha kecil,

perkembangan Dana kredit usaha kecil, masalah kredit usaha kecil dan mengatasinya, serta upaya dalam meningkatkan penyaluran usaha kecil.

BAB V

Penutup bab ini merupakan Bab terakhir yang memberikan kesimpulan yang diharapkan dapat bermanfaat.

